

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Reformasi banyak membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Salah satu dari sekian banyak reformasi yang membawa kepada suatu perubahan adalah hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Otonomi daerah dalam Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman Daerah.

Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam perspektif otonomi daerah, pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sumber keuangan paling utama selain jenis penerimaan daerah lainnya yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penerimaan lain-lain yang sah dan bukan dari pajak. Lebih besar kontribusi PAD untuk membiayai pembangunan dan pelayanan

masyarakat maka dapat dikatakan ada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Perolehan pendapatan asli daerah setiap daerah Kabupaten/Kota berbeda-beda, dimana dapat dibandingkan berdasarkan kemampuan kemajuan industrinya dan potensi kekayaan alam. Hal itulah menimbulkan suatu ketimpangan dalam penerimaan pendapatan asli daerah sehingga disatu daerah ada yang memiliki tingkat potensi pendapatan asli daerah yang tinggi dan pada daerah lain ada yang masih sangat tertinggal kekayaan potensi pendapatan asli daerahnya.

Selain harus memikirkan peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembiayaan belanja daerahnya juga harus memikirkan investasi daerahnya. Investasi adalah kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi (produksi) dengan harapan untuk memperoleh keuntungan pada masa-masa yang akan datang. Investasi dalam suatu perekonomian sangat diperlukan baik untuk menunjang pembangunan ekonomi maupun perluasan tenaga kerja.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, walaupun sumber daya alam itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam tersebut, diperlukan suatu proses yang disebut pembangunan. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk

meningkatkan, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Agar proses pembangunan berjalan lancar maka perlu adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara anggaran pendapatan dan belanja negara secara dinamis dan proporsional (Rosdiana, 2014).

Infrastruktur pembangunan daerah adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Pahlevi (2013) menyatakan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting untuk mempercepat proses pembangunan di Indonesia. Infrastruktur juga memegang peranan yang penting sebagai salah satu roda penggerak ekonomi di Indonesia. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan tingkat kepentingan, sehingga diperlukan skala prioritas pembangunannya, ada yang cukup dilaksanakan sekali saja dengan perawatan yang berlanjut, namun juga ada yang sifatnya dinamis dan berpotensi berkembang.

Menyadari pentingnya infrastruktur dalam mendorong pembangunan ekonomi, para pakar infrastruktur sepakat bahwa dalam mendorong pembangunan infrastruktur, pemerintah sebagai pemain utama dalam sektor infrastruktur selayaknya menjaga kesinambungan investasi pembangunan infrastruktur dan memprioritaskan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional, sehingga infrastruktur dapat dibenahi dengan baik secara kuantitas maupun kualitas. Pembangunan infrastruktur juga sepatutnya melibatkan pihak swasta dan

masyarakat demi tercapainya pembangunan berkesinambungan. Untuk itu perlu pendekatan lebih terpadu dalam pembangunan infrastruktur mulai dari perencanaan sampai pelayanannya kepada masyarakat, guna menjamin sinergi antar sektor, daerah maupun wilayah.

Adi (2006) dalam penelitiannya yang berjudul hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah (PAD), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Terkait dengan pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan yang menjadi andalan adalah retribusi dan pajak daerah. Tingginya retribusi bisa jadi merupakan indikasi semakin tingginya itikad pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih berkualitas. Belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya Rizki (2009) yang meneliti tentang Kontribusi PAD terhadap Belanja pembangunan daerah yang berstudi kasus di Kota Bekasi menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah Kota Bekasi masih rendah, tingkat efektivitas sudah cukup baik dalam lima tahun terakhir dan tingkat efisiensi pemerintah daerah Kota Bekasi masih kurang efisien, tingkat aktivitas sudah cukup baik dalam mengalokasikan dananya untuk belanja pembangunan, serta terdapat kontribusi yang signifikan dari pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja pembangunan daerah.

Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya adalah terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Kabupaten Gorontalo belum mampu membiayai daerah melalui sumber pendapatan asli daerah secara murni sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah cukup tinggi terhadap pemerintah pusat, sumber dana pembangunan daerah sebagian besar diperoleh dari pemerintah pusat dan sementara kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur penggunaan dana tersebut sangat relatif terbatas.

Berikut merupakan data data realisasi pendapatan asli daerah pada Kabupaten Gorontalo tahun 2010-2015.

**Tabel 1: Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo.**

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah	Jumlah
2011	3,998,115,677	3,988,720,578	20,000,000	30,236,285,481	38,243,121,736
2012	10,237,661,276	7,286,896,344	-	32,667,552,110	50,192,109,730
2013	7,620,016,897	5,095,901,735	10,000,000	44,854,020,416	57,579,939,048
2014	12,392,109,861	4,299,936,308	0	76,158,986,049	92,851,032,218
2015	15,086,441,005	7,824,775,943	4,045,325,515	86,288,539,901	113,245,082,364

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo masih sangat rendah dan mengalami fluktuasi sehingga realisasi anggaran pendapatan asli daerah itu masih kurang maksimal. Alasan peneliti memilih judul tentang penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) ini karena peneliti melihat kurangnya perolehan pendapatan asli daerah sendiri atau belum cukup dalam rangka memenuhi infrastruktur pembangunan daerah di Kabupaten Gorontalo.

Peneliti juga memperhatikan bahwasannya pendapatan asli daerah masih sangat kecil dan sangat diperlukan masukan dan saran yang cukup baik agar ke depannya sektor pendapatan asli daerah dapat menjadi sektor andalan yang mampu membiayai seluruh kebutuhan pembangunan yang ada di Kabupaten Gorontalo.

Dalam penelitian ini infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Admin (2013) menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Pemerintah Kabupaten Gorontalo selama tiga tahun terakhir dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat belum menunjukkan kemandiriannya.

Realisasi anggaran penerimaan pendapatan asli daerah dan infrastruktur pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2: Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Infrastruktur Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2010-2015.**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Infrastruktur Pembangunan Daerah	Selisih	%
2011	38,243,121,736	195,347,141,914.33	194,964,710,696,97	99%
2012	50,192,109,730	380,180,045,836.59	379,678,124,739,29	99%
2013	57,579,939,048	457,587,427,488.92	457,011,628,098,44	99%
2014	92,851,032,218	571,379,540,482.61	570,451,030,160,43	99%
2015	113,245,082,364	910,917,667,943.64	909,785,217,120,00	99%

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah PAD belum mampu membiayai sebagian besar infrastruktur pembangunan daerah, sehingga sangat dituntut upaya pemerintah daerah untuk mau mengembangkan potensi penerimaan daerahnya. Sebagaimana dengan undang-undang No 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah yang memberikan peluang pemerintah dalam hal menggali potensi sumber-sumber keuangannya untuk membiayai belanja daerahnya sendiri dan mengurangi ketergantungan anggaran dari pemerintah pusat guna pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian yang diformulasikan dalam sebuah berjudul **“Pengaruh Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Infrastruktur Pembangunan Daerah” (Studi Pada Kabupaten Gorontalo).**

### **1.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah terhadap pengaruh penerimaan pendapatan asli daerah terhadap infrastruktur pembangunan daerah di Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya sumber pendapatan asli daerah terhadap infrastruktur pembangunan daerah di Kabupaten Gorontalo.
2. Kurangnya kemampuan sumber pendapatan daerah dalam membiayai infrastruktur pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerimaan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap infrastruktur pembangunan daerah di Kabupaten Gorontalo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian yakni untuk mengetahui pengaruh penerimaan pendapatan asli daerah terhadap infrastruktur pembangunan daerah di Kabupaten Gorontalo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis



Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat bermanfaat sebagai penerapan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi terutama akuntansi sektor publik khususnya dalam hal pendapatan asli daerah dengan infrastruktur pembangunan daerah di Kabupaten Gorontalo.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadii masukan kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo khususnya terkait dengan pendapatan asli daerah dan infrastruktur pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo.